

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Organisasi sektor publik merupakan organisasi yang memiliki fokus pada pelayanan dan kepuasan bagi masyarakat, dimana beban tanggungjawabnya ada pada pemerintah selaku organisasi sektor publik terbesar yang harus memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian pelayanan publik melalui pelaksanaan program kerja yang baik tentu akan menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai kinerja pemerintah, namun pada kenyataannya dampak dari pelaksanaan program kerja pemerintah belum sepenuhnya dirasakan oleh masyarakat sehingga menimbulkan banyak keluhan dan kritikan terhadap kualitas yang ada. Penerapan *good governance* menjadi solusi yang dapat digunakan oleh pemerintah dalam mengatasi tuntutan dari masyarakat, penataan kembali sistem pemerintahan merupakan salah satu solusi yang tepat untuk menanggapi dan mengakomodasi tuntutan yang diberikan oleh masyarakat, dimana tuntutan dapat diakomodasi dengan terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan *good governance* di Indonesia dilakukan secara bertahap, salah satunya yaitu reformasi birokrasi yang berupa *grand design* dan tertuang dalam Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010. *Grand design* ini digunakan untuk menjadi acuan bagi kementerian, kelembagaan, dan pemerintah daerah dalam

mempercepat tercapainya *good governance* untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

Dalam peningkatan usaha untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah, tentu pemerintah juga harus memperbaiki kualitas pengendalian internnya untuk meningkatkan performa kerja. Peraturan mengenai pengendalian intern pada pemerintahan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 yaitu Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Menjalankan sistem pengendalian intern dengan tepat, tentu dapat mengarahkan dan mengontrol setiap organisasi untuk mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan sistem pengendalian intern pemerintah perlu ditingkatkan karena berdasarkan studi kasus di beberapa wilayah yang ada di Indonesia masih banyak terjadi kasus korupsi yang melibatkan aparatur sipil negara, dengan adanya hal demikian tentu sudah bukan menjadi rahasia umum bahwa sistem pengendalian intern pemerintah yang ada di Indonesia masih dirasa kurang baik.

Kota Tasikmalaya secara bertahap telah mewujudkan *good governance* di daerahnya dengan baik. Terbukti sejak lima tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2017 sampai tahun 2021 Pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang pada tahun sebelumnya mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah Kota Tasikmalaya berhasil mewujudkan *good governance* dalam meningkatkan kinerjanya. Adanya program-program pelayanan yang selalu diperbaharui untuk meningkatkan pelayanan publik demi memberikan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut juga telah

disampaikan oleh Wali Kota Tasikmalaya yaitu H. Muhammad Yusuf usai menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD tahun anggaran 2020 yang diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Barat, Agus Khotib, SE, MSI di aula Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Raihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tidaklah terlepas dari ketaatan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penggunaan anggaran keuangan daerah yang sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Keberhasilan dalam peraihan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ini merupakan bagian dukungan dan kerjasama dari Organisasi Pemerintah Daerah (ODP) yang ada di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya. Pelaporan keuangan yang baik tidak hanya berujung pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun ada hal yang lebih penting yaitu pada laporan keuangan tersebut akan menjadi sumber informasi yang sangat strategis terkhusus dalam pengambilan keputusan di Kota Tasikmalaya.

Meskipun telah meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), namun dalam pelaksanaan roda pemerintah tidak terlepas dari berbagai adanya kekurangan dan kinerja pemerintah daerah pun masih harus ditingkatkan kembali. Sebab pelayanan masyarakat yang lebih diutamakan sebagai motivasi bersama untuk terus meningkatkan kinerja dalam program kegiatan, akuntabilitas pengelolaan keuangan, transparansi, dan inovasi yang bermuara terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Maka dari itu dalam upaya memperbaiki kinerja pemerintah daerah maka haruslah diimbangi dengan penerapan *good governance* yang baik dan sistem pengendalian intern pemerintah yang baik pula. Maka, dapat dijelaskan bahwa *good governance* sangat erat hubungannya dengan

sistem pengendalian intern pemerintah. Karena tanpa adanya prinsip *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah yang dijalankan maka tidak akan tercipta kinerja pemerintah daerah yang baik. (Kabar Priangan, 2021)

Penerapan sistem pengendalian intern dinilai mampu membenahi kinerja pemerintah agar instansi mampu mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan dalam setiap tahunnya, semakin tinggi sistem pengendalian intern yang diterapkan, maka akan berdampak baik terhadap kinerja instansi pemerintah. Tentu semua itu akan berdampak baik terhadap perkembangan kinerja pemerintah daerah, apabila *good governance* diterapkan dengan baik serta sistem pengendalian intern pemerintah dapat berjalan optimal, maka semua tujuan dari organisasi akan mudah tercapai demi mewujudkan kualitas pelayanan terhadap publik.

Faktor yang diprediksi dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah salah satunya yaitu *good governance*. *Good governance* adalah suatu konsep pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pembangunan sektor publik (Mardiasmo, 2009: 18). *Good governance* merupakan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya yang harus diterapkan untuk mencapai sebuah kesuksesan dalam suatu organisasi, sehingga tujuan dapat tercapai sesuai dengan yang sudah direncanakan (Wijaya et al., 2018: 6). Pemerintah dapat menerapkan *good governance* untuk memperbaiki kinerja pemerintah daerah. Hal ini disebabkan karena dengan adanya penerapan *good governance* secara maksimal maka akan meningkatkan efisien dan efektivitas dari pemakaian sumber daya yang ada pada setiap organisasi (Taufik dan Kamala, 2013). Hasil penelitian Yang

dan Suartana (2017) membuktikan bahwa *good governance* berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun faktor lain yang diprediksi dapat mempengaruhi kinerja pemerintah daerah yaitu sistem pengendalian intern pemerintah. Sistem pengendalian intern adalah meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong terjadinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 2014: 163). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa sistem pengendalian intern pemerintah adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan para pegawai yang bertujuan untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan suatu organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan per undang-undangan. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan faktor penting dan diharapkan mampu mencegah pelaksanaan kegiatan yang kurang sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan adanya penerapan pengendalian intern, maka akan terciptanya pemerintahan yang ekonomis, efektif, dan efisien dalam instansi yang pada akhirnya akan tetap mengacu pada kinerja pemerintah. Penerapan sistem pengendalian intern yang baik dalam setiap unit atau divisi yang ada dalam organisasi dapat meningkatkan kinerja organisasi tersebut (Alfitriady et al., 2020). Hasil penelitian Kusuma (2021) membuktikan

bahwa sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap kinerja pemerintah.

Good governance dan sistem pengendalian intern pemerintah dijadikan sebagai acuan atau cermin untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi dalam roda pemerintahan, maka dari itu agar penerapan prinsip *good governance* berjalan dengan tepat maka diperlukan pula sistem pengendalian intern pemerintah yang maksimal atau memadai. Ketika pelaksanaan *good governance* tersusun secara tepat maka proses pengendalian intern pemerintah akan berjalan dengan lancar dan akan terhindar dari kesalahan atau kecurangan-kecurangan yang mungkin terjadi (Harmintarti, 2021). Kesalahan yang fatal akan menghambat berjalannya suatu organisasi pemerintah, sehingga roda pemerintah akan mengalami kendala dalam pelaksanaannya. Sistem pengendalian intern pemerintah memiliki keterkaitan dengan *good governance* karena tanpa adanya sistem pengendalian intern pemerintah yang ditumbuhkan dengan baik maka akan mempengaruhi tata kelola pemerintah atau *good governance* terganggu serta pelaksanaan program pemerintah tidak akan berjalan baik.

Agar terlaksananya kinerja pemerintah daerah yang berkualitas maka dibutuhkan *good governance* yang tertata dalam kinerja pemerintah daerah. *Good governance* atau tata kelola pemerintah yang tersusun dengan sistem pengendalian intern pemerintah yang memadai dapat membantu dalam pencapaian kinerja pemerintah daerah yang berkualitas. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra (2018). Hasil penelitian menyatakan bahwa *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah memiliki pengaruh positif pada kinerja

pemerintah. Dengan demikian tidak semua variabel *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah memberikan pengaruh yang sama atau konstan setiap tahunnya terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. Fenomena yang telah terjadi adalah variabel-variabel yang mempengaruhi Kinerja Pemerintah Daerah mengalami perubahan secara berkala, sehingga kenaikan dan penurunan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah mampu memberikan pengaruh positif maupun negatif sesuai situasi dan kondisi pemerintah saat itu.

Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu yang telah penulis uraikan pada bagian sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **“Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah” (Survei pada SKPD di Kota Tasikmalaya).**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya.
2. Bagaimana hubungan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Kota Tasikmalaya.
3. Bagaimana pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis:

1. *Good Governance*, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, dan Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya;
2. Hubungan *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada SKPD Kota Tasikmalaya;
3. Pengaruh *Good Governance* dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah secara parsial maupun simultan terhadap Kinerja Pemerintah Daerah pada SKPD Kota Tasikmalaya.

1.4 Kegunaan Hasil Penelitian

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan yaitu sebagai berikut:

1.4.1 Kegunaan Pengembangan Ilmu

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan tentang teori dan prakteknya di lapangan belajar menganalisa permasalahan yang ada khususnya dalam penelitian ini.

2. Bagi Pihak Lain

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi pihak yang mempunyai kepentingan khususnya untuk mengkaji topik yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Serta dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan kinerja pemerintah.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan yang berkaitan dengan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini juga diharapkan dapat melatih kemampuan dalam berfikir sistematis, kritis, dan teoritis sekaligus dapat menentukan solusi atas masalah yang terjadi dimasa depan.

2. Bagi Pemerintahan

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan ide pemikiran khususnya yang berhubungan dengan *good governance* dan sistem pengendalian intern pemerintah yang dapat digunakan sebagai evaluasi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah terutama pada Kota Tasikmalaya.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SKPD Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu mulai dari Oktober 2022 – Maret 2023. Dengan rincian kegiatan penelitian terlampir.